

SOSIALISASI PEMETAAN LOKASI PEREMAJAAN KELAPA SAWIT RAKYAT (PSR) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA PROVINSI ACEH

Iwandikasyah Putra^{1*}, Yulia Dewi Fazlina²⁾, Muhammad Jalil¹⁾, Irvan Subandar¹⁾,
Jekki Irawan¹⁾, Teuku Athallah³⁾, Iwan Saputra⁴⁾, T. Saiful Bahri⁵⁾

¹⁾Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Universitas Teuku Umar

²⁾Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Universitas Syiah Kuala

³⁾Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Universitas Teuku Umar

⁴⁾Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian. Universitas Samudra

⁵⁾Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian. Universitas Syiah Kuala

e-mail: iwandikasyahputra@utu.ac.id

Abstrak

Peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan salah satu kegiatan strategi nasional yang masuk ke dalam kegiatan sarana dan prasarana. Program ini merupakan program pemerintah dalam membantu masyarakat yang berkecimpung di dalam perkebunan sawit agar perkebunan kelapa sawit rakyat lebih berkualitas serta mengurangi resiko pembukaan lahan illegal. Namun, di dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan proses verifikasi dana untuk peremajaan sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan, selain itu terdapatnya tumpang tindih atas hak lahan para pengusul ataupun penerima manfaat pada kegiatan ini. Agar terhindar dari terjadinya tumpang tindih atas hak lahan maka perlu dilakukan pemetaan atas lokasi yang diusulkan. Pemanfaatan sistem informasi geografis memudahkan dalam melakukan kegiatan pemetaan tersebut. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan kunjungan lapangan untuk melakukan perekaman titik koordinat pada lokasi yang menjadi usulan calon lahan kegiatan peremajaan sawit rakyat. Hasil penelitian berupa peta lokasi calon lahan, sehingga diharapkan kegiatan peremajaan sawit rakyat (PSR) di Kabupaten Nagan Raya dapat berlangsung dengan optimal.

Kata kunci: Penyuluhan dan Edukasi, Peremajaan Sawit Rakyat, Sistem Informasi Geografis

Abstract

Rejuvenation of smallholder oil palm (PSR) is one of the national strategy activities that includes facilities and infrastructure activities. This program is a government program in helping people who are involved in oil palm plantations so that smallholder oil palm plantations are of higher quality and reduce the risk of illegal land clearing. However, in its implementation, it was found that the process of verifying funds for oil palm rejuvenation could not be accounted for, in addition to that there was overlapping land rights of the proposers or beneficiaries of this activity. In order to avoid overlapping land rights, it is necessary to map the proposed location. Utilization of geographic information systems makes it easier to carry out these mapping activities. The method used is counseling and field visits to record coordinate points at the location that is the proposed candidate land for smallholder oil palm rejuvenation activities. The results of the research are in the form of a map of the location of the prospective land, so that it is hoped that the people's oil palm rejuvenation (PSR) activities in Nagan Raya Regency can take place optimally

Keywords: Extension and Education, People's palm rejuvenation, Geographic Information System.

PENDAHULUAN

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten ini terletak di jalur pantai barat selatan aceh dengan luas wilayah 3.545 km (BPS, 2022). Kabupaten Nagan Raya dikenal sebagai salah satu kabupaten yang menjadi sentral perkebunan kelapa sawit. Sehingga kabupaten ini dikenal sebagai surga sawit dari tanah rencong. Luas areal tanaman perkebunan kelapa sawit sebesar 50.863,34 ha dengan produksi pada tahun 2021 sebesar 502.290,34 ton, dengan luas areal terbesar di Kecamatan Darul Makmur (BPS, 2022). Perkebunan kelapa sawit salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia pada umumnya, dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya dengan potensi daerah yang berbasis pada sektor pertanian/perkebunan menyumbang pertumbuhan ekonomi sangat tinggi dibandingkan sektor lainnya. Kontribusi PDRB sektoral ini di Kabupaten Nagan Raya mencapai 45,82%. Oleh

kerena itu pemerintah Kabupaten Nagan Raya memasukan sektor pertanian/perkebunan sebagai salah satu prioritas dalam program pembangunan wilayah. Indikasi ini telah terlihat dalam RPJMK Nagan Raya pada bagian Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, arah kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi adalah agribisnis dan ekonomi rakyat. Selain dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar, perkebunan kepala sawit di Kabupaten Nagan Raya dimiliki oleh rakyat. Upaya peningkatan kesejahteraan petani kecil melalui peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016, dimana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mempunyai tugas mulai dari merencanakan, menganggarkan, menghimpun, mengelola dan menyalurkan penggunaan dana, ketatausahaan dan pertanggungjawaban, serta mengawas dana peremajaan kelapa sawit, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan sarana dan prasarana. Peremajaan tanaman kelapa sawit dilakukan pada tanaman yang sudah tua dan berumur lebih dari 25 tahun (Pahan, 2008).

Program peremajaan membutuhkan upaya multidisiplin untuk mengembangkan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit. Selain itu, diperlukan juga pendanaan untuk peremajaan, mulai dari pengolahan lahan perkebunan yang ada, penyiapan sarana produksi, penanaman dan pemeliharaan. Perlu juga diperhatikan sumber pendapatan petani (ekonomi pertanian) selama tanaman belum produktif, dan fasilitas yang akan menyukseskan program peremajaan.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam kegiatan sarana dan prasarana (Sarpras) adalah sebuah kegiatan strategis nasional. Peremajaan tanaman (*replanting*) dilakukan agar hasil produksi kebun sawit tidak menurun secara drastis. Untuk itu maka pemerintah telah membuat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang merupakan program untuk membantu pekebun rakyat memperbaharui perkebunan kelapa sawit merekadangan kelapa sawit yang lebih berkualitas, dan mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal. Melalui PSR, produktivitas lahan milik pekebun rakyat bisa ditingkatkan tanpa melalui pembukaan lahan baru.

Penyaluran dan pemanfaatan dana PSR hendaknya dapat berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga meningkatkan produktivitas sawit petani dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Secara garis besar, masih ditemukan sejumlah permasalahan pada program PSR. Pertama, adanya temuan proses verifikasi dana diperuntukkan untuk peremajaan sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan atau pengadaan. Kedua, adanya syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. Ketiga, adanya tumpang tindih atas hak atas lahan para pengusul atau penerima manfaat program. Keempat, adanya temuan saat penarikan dana tidak melampirkan bukti tagihan. Untuk itu Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya mengadakan Sosialisasi Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) yang dihadiri oleh para calon penerima PSR di Kabupaten Nagan Raya. Sehingga diharapkan kepada calon penerima PSR mendapatkan pemahaman cerdas secara kompleks terhadap persoalan yang mungkin akan dihadapi di lapangan, sehingga memberikan solusi dini terhadap persoalan tersebut.

Permasalahan akibat terjadinya tumpang tindih atas hak lahan yang diusulkan dapat diselesaikan dengan melakukan pemetaan area berupa polygon dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis berasal dari gabungan 3 kata: Sistem, Informasi, dan Geografis. Dari ketiganya, dapat dipahami bahwa Sistem Informasi Geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi Bumi dalam sudut pandang keruangan. Masukan data SIG banyak diperoleh dari citra penginderaan jauh maupun dengan penggunaan GPS (*Global Positioning System*). Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan (Jogianto, 2005; Prahasta, 2002; Demers, 2003).

Diharapkan dengan dilakukannya sosialisasi penetapan polygon lokasi calon lahan peremajaan saawit rakyat yang akurat, tidak akan lagi jumpai permasalahan mengenai hak milik lahan kedepannya, selain itu, penyiapan peta usulan lokasi yang berkoordinat, yang merupakan salah satu dari 14 persyaratan dan prosedur penerima PSR.

METODE

Kegiatan ini dilakukan dalam dua tahap, pertama dilakukan sosialisasi kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR) yang dilaksanakan di Aula Grand Nagan Hotel. Pada kegiatan sosialisasi ini dilakukan penyampaian materi tentang teknik pengambilan koordinat (polygon) dengan menggunakan GPS dalam pelaksanaan PSR. Kegiatan selanjutnya berupa sosialisasi serta praktek penggunaan GPS kepada para petani, kelompok tani, koperasi, pengawas koperasi dan tim peremajaan kelapa sawit.

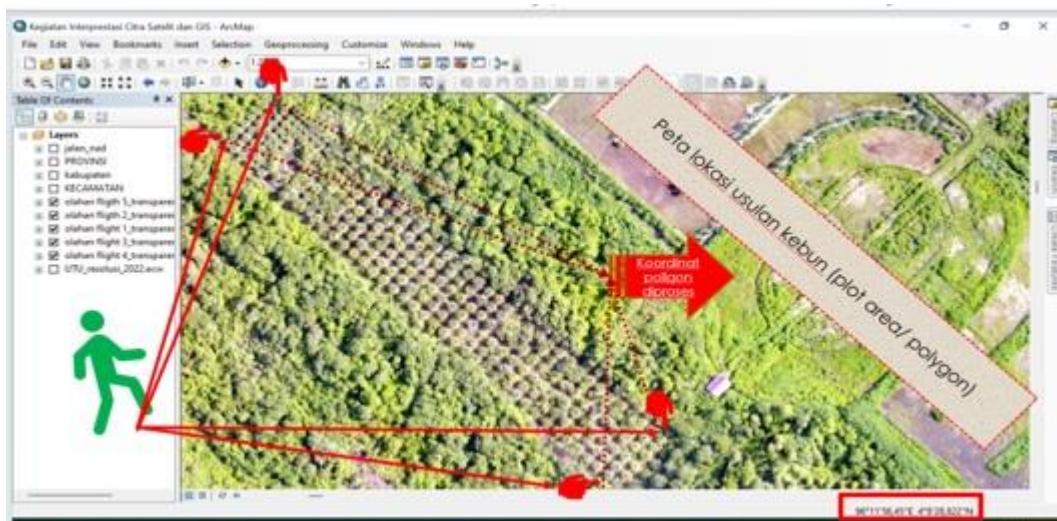
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi menjelaskan tujuan pengambilan titik koordinat secara polygon dalam pelaksanaan peremajaan kelapa sawit rakyat yaitu untuk memenuhi syarat yang diajukan dalam melakukan realisasi PSR, selain itu untuk menghindari konflik horizontal akibat terjadinya tumpang tindih calon lokasi PSR. Narasumber menjelaskan bagaimana pembuatan peta area PSR di calon lokasi lahan, hasil dari survey pemetaan yang dilakukan secara partisipatif dengan memanfaatkan berbagai sarana, baik menggunakan GPS maupun Drone.



Gambar1. Narasumber Menyampaikan Materi dalam Kegiatan Sosialisasi PSR

Secara rinci, proses pengambilan titik koordint secara polygon untuk mendukung pelaksanaan PSR dimulai dari identifikasi awal lokasi PSR, dilanjutkan dengan survei lapangan secara partisipatif ataupun pemasangan patok untuk lokasi PSR yang berbatasan dengan lahan yang tidak masuk ke dalam program PSR dan lahan-lahan milik pemerintah. Setelah permasalahan mengenai kepemilikan lahan selesai, kemudian dilakukan pengambilan titik koordinat secara polygon baik menggunakan GPS maupun drone. Data-data yang diperoleh dilapangan kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi pengolahan data sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta lokasi calon PSR yang akurat.



Gambar 2. Proses Pembuatan Peta Lokasi Calon Lahan PSR



Gambar 3. Penutupan Kegiatan Sosialisasi PSR

Kegiatan selanjutnya selanjutnya berupa sosialisasi serta praktek penggunaan GPS kepada para petani, kelompok tani, koperasi, pengawas koperasi dan tim peremajaan kelapa sawit. Para petani, kelompok tani serta tim peremajaan kelapa sawit (PSR) diberikan pelatihan bagaimana melakukan perekaman titik koordinat berupa polygon pada calon lokasi lahan yang masuk ke dalam kegiatan peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR), selain itu juga dilakukan pembuatan patok batas pada lokasi-lokasi yang bersebelahan dengan lahan pemerintah maupun lahan yang tidak masuk ke dalam lokasi calon kegiatan PSR.



Gambar 4. Kegiatan Lapangan Perekaman Koordinat Calon Lokasi Lahan

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dalam rangka pengambilan pemetaan calon lokasi lahan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat (PSR) dilakukan dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan kemampuan kepada pemerintah serta masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan tersebut untuk melakukan pemetaan pada lahan-lahan yang menjadi calon lokasi, sehingga diharapkan tidak akan terjadi konflik dan tumpang tindih kepentingan terhadap lahan tersebut.

SARAN

Perlu dilakukan kegiatan praktik lebih lanjut kepada para stakeholder maupun masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan peremajaan kebun sawit rakyat (PSR) dalam penggunaan GPS dan pemetaan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2022). Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka 2022. BPS Kabupaten Nagan Raya.
- Demers, MN (2003). Fundamental of geographic information system, Second Edition, New Mexico State University, USA.
- Indra, I., Suraiya, S., Halimursyadah, H., Bagio, B., Baihaqi, A. (2022). Introduksi Inovasi Budidaya Nilam Dan Produk Turunannya Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 6 No 2. Hal 380-386. DOI: <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v6i2.1701>
- Jogiyanto. (2005). Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, A., Handayani, S. ., Bagio, B., Agustiar, A., & Sufriadi, S. (2023). Sosialisasi Program Sawit Rakyat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 49–53. <https://doi.org/10.57251/mabdimas.v2i2.858>
- Pahan, I. (2008). Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Peraturan Presiden (PERPRES) No. 24 Tahun 2016. (2016). Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Jakarta.
- Perkebunan, D. (2020). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Prahasta, Eddy. (2002). Sistem Informasi Geografis: Konsep-Konsep Dasar Informasi Geografis. Bandung: Informatika Bandung.